

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program “*Smart City – E-government*” oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan melalui Sosialisasi. *Smart City* merupakan suatu konsep pembangunan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah sebagai interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (sumber: Laporan Akhir Pembuatan Masterplan *Smart City* Kabupaten Pamekasan). *Smart City* adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam rangka meningkatkan infrastruktur pemerintahan (sumber: wawancara dengan Supriyanto – Kepala Humas dan Protokol Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan). *Smart City* di Indonesia saat ini sudah mencapai 25 wilayah yang terdiri dari kota dan kabupaten. Kota-kota tersebut yaitu: Kota Jambi, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Banyuasin, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kab. Sleman, Kota Semarang, Kab. Banyuwangi, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Badung, Kota Singkawang, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Makassar, Kota Tomohon, dan Kab. Mimika (sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/25-kota-perintis-smart-city>).

Sebelum *Smart City* disosialisasikan pada masyarakat luas, Pegawai Negeri Sipil Pamekasan harus memahami terlebih dahulu apa itu *Smart City* dan bagaimana cara kerjanya. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan tersebut adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk

membantu dalam memberikan penjelasan mengenai program *Smart City* nantinya.

Proses sosialisasi pada Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara tatap muka dan diadakan diskusi pada sela-sela penjelasan. Maka penelitian ini menggunakan model komunikasi dari Osgood dan Wilbur Schramm, dimana komunikasi adalah sebagai bentuk interaksi antara kedua belah pihak yang mengkode, mentransmisikan, menafsirkan, mengkode, dan mentransmisikan kembali, sehingga komunikator dan komunikan dapat saling berganti peran (Moerdijati, 2012:83). Wilbur Schramm dalam Mulyana, 2016 menyampaikan bahwa ada encoder, message (pesan), interpreter, dan decoder. Dalam penelitian ini encoder dan decodernya adalah Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Pesan yang disampaikan adalah mengenai program *Smart City* itu sendiri.

Peneliti menggunakan model proses komunikasi Osgood dan Wilbur Schramm ini dikarenakan dalam proses penyampaian program *Smart City* Kabupaten Pamekasan disampaikan melalui sosialisasi yang berupa tatap muka pada Pegawai Negeri Sipil sehingga menimbulkan komunikasi dua arah dan akan menimbulkan *feedback*. *Feedback* tersebut nantinya akan menghasilkan efek.

Efek dari komunikasi yang terjadi pada komunikan ada tiga, yaitu efek kognitif (pengetahuan), efek afektif (sikap), dan efek konatif (tindakan) (Mulyana, 2016:71). Pada penelitian ini, efek yang dihasilkan dalam proses komunikasi adalah efek kognitif, dimana berkaitan dengan tingkat pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program *Smart City* tersebut.

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (sumber: UU Republik Indonesia no 5 tahun 2014). Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS yang dimaksud adalah merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Smart City di Pamekasan adalah program baru mulai dari bulan Januari 2018 yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan adanya *Smart City* ini agar Kabupaten Pamekasan dapat bersaing dengan kota-kota besar dan kabupaten lainnya dalam hal teknologi dan dapat mempermudah masyarakat Pamekasan dalam mengakses info seputar tempat-tempat umum dan kebutuhan pendidikan seperti rumah sakit, tempat pariwisata, dan jadwal pendaftaran sekolah-sekolah yang ada di Pamekasan (sumber: wawancara dengan Supriyanto – Kepala Humas dan Protokol Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan).

Pamekasan adalah satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang memiliki program *Smart City* tersebut. *Smart City* di Kabupaten Pamekasan menggunakan jaringan *fiber optic* yang akan diletakkan di kantor masing-masing dinas pemerintahan. *Smart City* sendiri akan dihubungkan dengan 12 aplikasi dan teknologi terkini, yang akan dikemas secara online (sumber:

wawancara dengan Ir. H. Bahrin, MM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan). Sosialisasi pada Pegawai Negeri Sipil menjadi lebih awal karena program *Smart City* yang pertama akan dibuat dan diluncurkan oleh Diskominfo adalah *e-government*. Program *e-government* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi negara secara online dan memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, dimana data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. Program *e- government* dijalankan terlebih dahulu agar dapat mempermudah dan mempercepat infrastruktur dan kinerja pemerintahan (sumber: Wawancara dengan Yayuk – Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi).



Gambar I.I

Ruang Data Center *Smart City*

Sumber : Laporan Akhir *Masterplan Smart City* Kabupaten Pamekasan



Gambar I.II

Ruang Data Center Smart City

Sumber : Laporan Akhir *Masterplan Smart City* Kabupaten Pamekasan

Sosialisasi mengenai *Smart City* sudah dilakukan kurang lebih enam kali terhitung dari bulan September 2017 sampai Februari 2018 (satu bulan satu kali pertemuan). Dari enam kali sosialisasi, pernah satu kali dicoba untuk *teleconference* (rapat jarak jauh) antara Bupati Pamekasan di Pemda dengan Diskominfo (sumber: Wawancara dengan Vrita Prasetyarini, S.Kom– Kabid Sistem Informasi Manajemen Informatika). Sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dengan cara tatap muka, yaitu dengan mengumpulkan seluruh PNS pada ruang serba guna di kantor pusat Pemda. Kemudian kepala Diskominfo Ir. H. Bahrn, MM mempresentasikan bagaimana cara kerja *Smart City*, khususnya *e-government*. Disela-sela penjelasannya, Ir. H. Bahrn mengizinkan siapa saja yang kurang paham agar bertanya, mengingat cara kerja *e- government* akan rumit karena merupakan hal baru bagi PNS Pamekasan. Sebelum disebarluaskan untuk masyarakat, PNS harus memahami terlebih dahulu tentang cara kerja *Smart City* tersebut agar dapat

membantu pemerintah dalam menyampaikan program *Smart City* pada masyarakat nantinya.

Setelah peneliti mendapatkan penjelasan dari Pemda dan Diskominfo, peneliti melakukan wawancara singkat dan acak kepada 30 PNS. Hasil dari wawancara singkat yang dilakukan peneliti, sebanyak 10 dari 30 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemda dan Diskominfo mengaku belum mengetahui adanya program *Smart City – e-government* (pada Januari 2018). Maka dari itu, tingkat pengetahuan dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan perlu untuk diteliti karena sebelum program *Smart City* disebarluaskan untuk publik, Pegawai Negeri Sipil harus mengetahui terlebih dahulu adanya program *Smart City* tersebut.

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian serupa yang meneliti program pemerintahan juga, yaitu Sosialisasi Program Keluarga Berencana oleh Pusat Kesehatan Desa dengan Pendekatan Komunikasi Interpersonal di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yang diteliti oleh Ika Sari P. (2016), mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Penelitian ini lebih membahas pada sosialisasi interpersonal dengan warga desa, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih membahas mengenai program pemerintahannya.

Terdapat juga penelitian serupa yaitu milik Ester Sakarina (2016) mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yaitu Tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui Iklan Layanan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan di televisi. Beda penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian milik Ester membahas iklan yang diputar oleh BPJS agar diketahui masyarakat

Surabaya yang sedang bekerja, penelitian milik peneliti lebih membahas pada pengetahuan PNS melalui sosialisasi mengenai program *Smart City – E-Government*.

Penelitian ini menggunakan metode survei. Pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya didapatkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi dan informasi dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara (Silalahi, 2012:38). Peneliti menggunakan metode survei karena metode tersebut menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dalam penelitian kuantitatif.

I.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program “*Smart City – E-government*” oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan melalui Sosialisasi?

I.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program “*Smart City – E-government*” oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan melalui Sosialisasi.

I.4. Batasan Masalah

Subjek : Pegawai Negeri Sipil

Objek : Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil mengenai Program *Smart City – E-government*

Metode penelitian : survei

Jenis penelitian : Kuantitatif deskriptif

I.5. Manfaat Penelitian

I.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian proses komunikasi lainnya pada tingkat pengetahuan mengenai program pemerintahan di suatu tempat.

I.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran secara praktis melalui hasil penelitian yang sudah dijalankan, dengan mampu memberikan gambaran mengenai Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program “*Smart City – E-government*” oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan melalui Sosialisasi.